

IMPLEMENTASI PENYULUHAN EMPAT PILAR KEBANGSAAN OLEH PENYULU AGAMA ISLAM NON PNS DI JAWA TIMUR

Darmani

Balai Diklat Keagamaan Surabaya, dar_darmani@yahoo.com

Abstrak

Penyuluh Agama Islam Non PNS memiliki peranan sangat penting dalam masyarakat, khususnya dalam penyuluhan empat pilar kebangsaan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui a) proses implementasi penyuluhan Pancasila oleh Penyuluh agama Islam Non PNS di Jawa Timur, b) proses implementasi penyuluhan nilai-nilai Undang Undang Dasar 1945 oleh Penyuluh agama Islam Non PNS di Jawa Timur, c) proses implementasi penyuluhan nilai-nilai Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Penyuluh agama Islam non PNS di Jawa Timur, dan d) proses implementasi penyuluhan Bhineka Tunggal Ika oleh Penyuluh agama Islam non PNS di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan analisis dokumen. Validasi data menggunakan triangulasi dan perpanjangan keikutsertaan. Dari analisa data penelitian disimpulkan: a) proses implementasi penyuluhan pancasila dilaksanakan sesuai petunjuk teknis penyuluhan. Implementasi pancasila lebih mudah dilaksanakan karena objek bimbingan sudah terbiasa mendengar pancasila. b) proses implementasi penyuluhan Undang Undang Dasar 45 dilaksanakan sesuai petunjuk teknis penyuluhan. Implementasi Undang Undang Dasar 45 lebih sulit dilaksanakan karena objek bimbingan merasa berat dengan bahasan pasal-pasal. c) proses implementasi penyuluhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan sesuai petunjuk teknis penyuluhan. d) proses implementasi penyuluhan Bhineka Tunggal Ika dilaksanakan sesuai petunjuk teknis penyuluhan. Adapun kendala dalam implementasi empat pilar diantaranya pemahaman jamaah yang berbeda, usia yang berfariasi, dan terbatasnya media pembelajaran. Adapun solusinya adalah penyuluh berkoordinasi dengan ketua kelompok binaan dan ketua pokjalah yaitu dengan pengulangan materi, diskusi kelompok sesuai usia, metode yang sesuai dengan karakteristik jamaah dan media-media baru yang sesuai.

Kata Kunci: Implementasi, Penyuluhan, Penyuluh Agama, Empat Pilar.

Abstract

Non civil servant Islamic Religious Instructor has a very important role in society, especially in training the four pillars of nationality. The purpose of this study was to determine a) the process of implementing Pancasila counseling by Non civil Islamic Religious Instructors in East Java, b) the process of implementing the values of the 1945 Constitution by Non civil Islamic Religious Instructors in East Java, c) the process of implementing information dissemination -the value of the Unitary State of the Republic of Indonesia by Non civil Islamic Religious Instructors in East Java, and d) the process of implementing the Unity in Diversity Counseling by Non civil Islamic Religious Instructors in East Java. This study uses qualitative research. Data collected through interviews, observation and document analysis. Data validation uses triangulation and extension of participation. From the analysis of the research data it was concluded: a) the process of implementing Pancasila counseling was carried out according to the technical guidance of the extension. Pancasila implementation is easier because the object of guidance is used to hearing Pancasila. b) the process of implementing counseling in the 1945 Constitution is carried out in accordance with the technical guidance of the extension. Implementation of the 1945 Constitution is more difficult to implement because the object of guidance feels heavy with the discussion of the articles. c) the process of implementing the extension of the Unitary State of the Republic of Indonesia was carried out in accordance with the technical guidance of the extension. d) the process of implementing Bhineka Tunggal Ika counseling is carried out according to the technical guidance of the extension. The obstacles in implementing the four pillars include understanding different pilgrims, varying ages, and the limitations of learning media. The solution is to instruct the coordinator with the head of the fostered group and the head of the pokjalah by repeating the material, group discussions according to age, methods that are appropriate to the characteristics of the congregation and suitable new media.

Keywords: Implementation, Counseling, Religious Extension, Four Pillars.

PENDAHULUAN

Berdasarkan keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ. III/342/Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Penyuluh Agama Islam Non PNS Penyuluh Agama Islam (PAI) Non PNS merupakan pegawai pemerintah yang diangkat, ditetapkan dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang secara penuh untuk melakukan kegiatan bimbingan, penyuluhan melalui bahasa agama dan pembangunan pada masyarakat melalui surat keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Penyuluh Agama non PNS memiliki fungsi strategis dalam pembangunan bangsa. Fungsi tersebut meliputi: fungsi informatif, konsultatif, edukatif dan advokatif. Berdasar Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 298 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh agama Islam non PNS adalah melakukan bimbingan dan penyuluhan keIslaman dan pembangunan melalui bahasa agama kepada kelompok sasaran sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama.

Agar Penyuluh Agama Islam Non PNS memiliki kompetensi yang diharapkan, maka dilaksanakan program pendidikan dan pelatihan (diklat) penyuluhan bagi Penyuluh. Program penyuluhan ini dilaksanakan oleh pemerintah melalui anggaran negara yang sudah dialokasikan pada tahun tersebut di semua Propinsi di seluruh Indonesia secara bertahap.

Peserta diklat Penyuluh Agama Islam Non PNS adalah mereka yang telah lolos mengikuti seleksi penerimaan Penyuluh agama Islam Non PNS di tingkat Kabupaten atau Kota Se Indonesia. Peserta diklat mendapatkan pelatihan selama enam hari dengan materi, antara lain: Wawasan Kebangsaan, KUB (Komunikasi Umat Beragama), Tugas dan Fungsi Pokok Penyuluh, dan lain-lain.

Materi wawasan kebangsaan menjadi salah satu materi yang disampaikan kepada penyuluh agama Islam non PNS. Materi ini memiliki standar kompetensi “memahami wawasan kebangsaan”. Sedangkan indikator dari materi wawasan kebangsaan berdasarkan silabus widyasarwa Surabaya tahun 2017 adalah menjelaskan sejarah pendirian bangsa, menjelaskan konsep negara dan bangsa, menjelaskan 4 (empat) pilar kebangsaan, mengidentifikasi nilai-nilai kejuangan kontemporer, dan menjelaskan daya saing nasional. Output dari diklat ini di antaranya adalah memahami konsep wawasan kebangsaan dan mampu mengamalkan

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dari diklat penyuluh Agama Islam Non PNS, ada rencana tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam Non PNS untuk menyampaikannya kembali materi wawasan kebangsaan terutama empat pilar kebangsaan kepada kelompok binaan.

Penyuluh agama Islam non PNS terbagi ke dalam 8 spesialisasi yaitu penyuluh pengentasan buta huruf al-qur'an, penyuluh keluarga sakinah, penyuluh pengelolaan zakat, penyuluh pemberdayaan wakaf, penyuluh produk halal, penyuluh kerukunan ummat beragama, penyuluh radikalisme dan aliran sesat dan penyuluh NAFZA dan HIV/AIDS. Setiap penyuluh diwajibkan minimal memiliki satu spesialisasi penyuluh. Penyuluh Agama Islam non PNS memiliki minimal 2 kelompok binaan yang dibimbing minimal 2 kali dalam satu pekan. Kelompok binaan adalah sekelompok orang atau beberapa anggota masyarakat yang di kelompokkan oleh penyuluh agama untuk menjadi sasaran bimbingan dan penyuluhan agama secara kontinu dan terencana. Kelompok binaan minimal beranggotakan 10 orang dari berbagai lapisan kelompok masyarakat.

Penyuluh agama Islam non PNS memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Salah satu tujuan umumnya adalah standarisasi bagi penyelenggaraan penyuluhan agama Islam dalam rangka sosialisasi, diseminasi, dan internalisasi terkait dengan kebijakan serta program dalam penyelenggaraan penyuluhan agama Islam, yang dilakukan oleh pemerintah dan stakeholder, mengoptimalkan peran dan mobilitas masyarakat dalam menunjang tercapainya visi bimas Islam. Maka dalam melaksanakan tugasnya, penyuluh agama Islam non PNS harus melakukan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi sehingga pelaksanaannya akan semakin efisien dan efektif.

Berdasarkan Jurnal Ketahanan Nasional Edisi No 1 April 2018, bahwa direkomendasikan untuk dilaksanakan upaya untuk menumbuhkan nilai-nilai pentingnya wawasan Kebangsaan bagi orang tua dan guru. Materi diklat “wawasan kebangsaan” widyasarwa Surabaya, 2017 menyebutkan temuan Riset Puslitbang Kehidupan Keagamaan berjudul “Wawasan Kebangsaan Kelompok Keagamaan Baru di Indonesia” (2012) yang mengkaji 19 kelompok keagamaan, menegaskan masih adanya kelompok (kecil) keagamaan yang mengharapkan bentuk negara lain selain NKRI, dan menyatakan

Pancasila dapat diubah dan ada penolakan terhadap UUD 1945. Maka dari itu sosialisasi terhadap empat pilar kebangsaan masih perlu dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti memiliki inisiatif untuk mengetahui sejauh mana implementasi dari program penyuluhan berkaitan dengan wawasan kebangsaan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui a) proses implementasi penyuluhan Pancasila oleh Penyuluh agama Islam non PNS di Jawa Timur, b) proses implementasi penyuluhan nilai-nilai Undang Undang Dasar 1945 oleh Penyuluh agama Islam non PNS di Jawa Timur, c) proses implementasi penyuluhan nilai-nilai Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Penyuluh agama Islam non PNS di Jawa Timur, dan d) proses implementasi penyuluhan Bhineka Tunggal Ika oleh Penyuluh agama Islam non PNS di Jawa Timur.

KERANGKA KONSEPTUAL

Adapun kerangka konseptualnya adalah sebagai berikut :

Kerangka konseptual pelaksanaan penyuluhan



Gambar 1.1 Kerangka konseptual

Empat pilar kebangsaan

Empat pilar kebangsaan dalam penelitian ini adalah materi penyuluhan yang diberikan kepada kelompok bimbingan meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Semua materi telah disampaikan dalam diklat penyuluh Agama Islam Non PNS sebagai bekal untuk disampaikan kepada kelompok binaan.

Penyuluh Agama Islam Non PNS

Prosedur pelaksanaan penyuluhan yang harus dilaksanakan oleh penyuluh adalah sebagai berikut:

Perencanaan penyuluhan

Perencanaan penyuluhan meliputi 1) Rencana kerja tahunan, 2) Rencana kerja bulanan, dan 3) rencana kerja mingguan.

Pelaksanaan penyuluhan

Metode dalam pelaksanaan penyuluhan yaitu metode partisipatif, metode dialog interaktif, dan

metode pemberdayaan.

Bentuk-bentuk penyuluhan dapat dilakukan melalui ceramah agama, bimbingan konseling, media dan konsultasi.

Evaluasi penyuluhan

Evaluasi penyuluhan dilaporkan dalam bentuk penyajian data agar dapat memberikan suatu gambaran/informasi kepada seseorang atau suatu organisasi dengan suatu cara yang efektif dan efisien dan dapat dijadikan suatu informasi yang tepat, lengkap dan akurat. Dilihat dari jenis Pelaporan, laporan Penyuluh Agama Islam Non-PNS merupakan suatu bentuk penyajian data yang berisi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama selama 1 (satu) bulan. Adapun bahan laporan Penyuluh Agama Islam Non PNS, berupa form Laporan Penyuluh Agama, form lembaran materi Penyuluh dan daftar hadir Jamaah. Teknik penyusunan laporan penyuluh agama adalah dengan cara menyusun laporan bulanan dengan mengisi blangko laporan penyuluh yang terdiri dari: bulan, identitas penyuluh, hari/tanggal pelaksanaan, pokok-pokok materi, uraiannya, jumlah anggota kelompok binaan yang hadir, serta tanda tangan Ketua Pengurus kelompok binaan, hambatan, pemecahan masalah, usul dan saran.

METODE

Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Menurut Suharsimi Arikunto (2006:310) yaitu penelitian yang menggambarkan apa adanya tentang sesuatu variabel, gejala atau keadaan. Data dalam penelitian ini data diperoleh dari wawancara, observasi dan analisis dokumen.

Mengingat jumlah lokasi yang cukup luas, dalam penelitian ini diambil 3 kabupaten sebagai objek data penelitian dengan kriteria Kabupaten/Kota termiskin, menengah dan atas tingkat regional Jawa Timur berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017 yaitu Tulungagung, Ponorogo, dan Pamekasan. Adapun informan/narasumber yaitu penyuluh Agama Islam Non PNS di setiap kabupaten sejumlah 1 orang, peserta penyuluhan sejumlah 6 orang dan kepala kelompok kerja penyuluh (Pokjaluh) di setiap kabupaten sejumlah 1 Orang. Teknik wawancara yang digunakan yaitu wawancara berstruktur (structured interview) dan wawancara tidak terstruktur (unstructured interview).

Observasi dilakukan pada saat kegiatan pelaksanaan penyuluhan. Dokumen yang dianalisis

yaitu dokumen pertemuan, laporan pelaksanaan, daftar hadir, dan materi penyuluhan.

Validasi data atau uji keterpercayaan data menggunakan teknik triangulasi dan perpanjangan keikutsertaan (Sugiyono, 2010:331).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses implementasi penyuluhan pancasila

Proses implementasi penyuluhan pancasila oleh penyuluh agama Islam non PNS di Jawa Timur dilaksanakan melalui proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Proses perencanaan meliputi penyusunan program kerja, penyusunan materi yang akan disampaikan dan pelaksanaan perencanaan teknis berupa tempat. Proses pelaksanaan meliputi waktu pelaksanaan, strategi yang digunakan, dan evaluasi dalam pelaksanaan. Sedangkan proses evaluasi dilaksanakan dengan memberikan catatan dan laporan kepada pimpinan tingkat kecamatan yang kemudian dinaikkan ke tingkat kabupaten untuk ditindak lanjuti.

Proses perencanaan implementasi penyuluhan Pancasila melalui program kerja mingguan, bulanan, dan tahunan, sebagaimana hasil wawancara dengan pokjalah kabupaten Ponorogo dan hasil analisis dokumen laporan pelaksanaan penyuluhan, serta hasil wawancara dengan penyuluh Agama Islam Non PNS Kab. Ponorogo saudara RS sebagai berikut :

“Sebelum melaksanakan penyuluhan biasanya setiap awal tahun kami membuat program tahunan, kira-kira apa yang akan kami sampaikan kepada jamaah terkait dengan materi-materi yang hendak dicapai. Dari program tahunan diperkecil menjadi program bulanan, dan program mingguan.” RS

Hal ini sejalan dengan pernyataan AR, penyuluh Agama Non PNS dari Pamekasan “ya ada rencana bulanan, dan tahunan, nah dari situ dipakai untuk acuan pelaksanaan. Kalau untuk penyuluhan Pancasila ini saya pakai itu (acuan rencana kerja tahunan, dan bulanan) dan tentunya materi dan tempat yang harus disiapkan.”

Hasil wawancara dengan ketua Pokjalah (Kelompok Kerja Penyuluh) kabupaten Tulungagung, Ponorogo dan Pamekasan menyatakan bahwa ada perencanaan pelaksanaan penyuluhan bersama pokjalah dan koordinasi setiap minggu dan bulan. Selain itu juga ada group *WhatsApp* antar penyuluh Agama Islam Non PNS yang dapat digunakan sebagai sarana koordinasi dan komunikasi setiap saat.

Dari analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan implementasi Pancasila dirancang sesuai program kerja mingguan, bulanan, dan tahunan. Selain itu dalam tahap perencanaan juga ada persiapan tempat dan materi. Persiapan materi dikoordinasikan dengan Ketua Pokjalah, baik konsultasi secara langsung maupun melalui group *Whats App*.

Materi Pancasila yang diajarkan oleh penyuluh agama Islam Nonn PNS di Jawa Timur dirancang dalam bentuk materi ajar sebagaimana hasil wawancara dengan RS

“Kalau materi pasti itu kita siapkan, soalnya jamaah kita kan sudah lebih tua. Jadi disamping membutuhkan mental yang agak kuat, juga perlu materi yang dikuasai, agar kalau menyampaikan tidak gugup. Kalau materinya nggak paham kan bisa-bisa keluar keringat dingin. Pepatah mengatakan “persiapan adalah 50% dari keberhasilan”.

Sejalan dengan pendapat di atas, wawancara dengan AR menyebutkan bahwa “Saya biasanya menyiapkan dalam bentuk buku catatan *point-point*.” Persiapan materi memang penting karena juga menjadi salah satu prosedur dalam pelaksanaan implementasi penyuluhan kepada kelompok binaan, sebagaimana hasil wawancara dengan ketua Pokjalah IH.

Proses pelaksanaan implementasi penyuluhan Pancasila melalui metode seperti ceramah, tanya jawab dan diskusi. Metode yang digunakan dalam penyuluhan menyesuaikan dengan *audience/* Kelompok binaan. Kelompok Binaan yang beranggotakan orang tua menggunakan ceramah, sedangkan untuk jamaah yang beranggotakan orang muda menggunakan diskusi dan tanya jawab. Hal ini sebagaimana penjelasan hasil wawancara penyuluh RS dari Ponorogo bahwa “Biasanya saya pakai metode ceramah, karena jamaah orang desa, kalau mau pakai metode lain kayaknya kurang cocok.” Penggunaan metode yang tepat kepada kelompok binaan patut dipertimbangkan sebagaimana pendapat NS “Saya pakai metode ceramah dan diskusi, kadang juga tanya jawab. Menyesuaikan saja dengan jamaah. Kalau orang tua saya ceramah, kalau agak-agak muda ya ketiganya saya pakai. Soalnya kalau ceramah saja nanti ngantuk.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan peserta penyuluhan dari kelompok binaan penyuluh RS yaitu SS dan JK menyatakan bahwa pernah dilaksanakan penyuluhan Pancasila untuk kelompok binaan RS. Hal ini juga sejalan dengan laporan yang diperoleh oleh ketua Pokjalah Ponorogo.

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pemilihan metode yang tepat dalam penyampaian materi sangatlah penting karena setiap audiens memiliki karakteristik yang berbeda. Anak kecil memiliki kecenderungan gemar bermain, berbeda dengan orang dewasa yang baru menikah, berbeda lagi dengan orang yang sudah berumur.

Adapun dokumentasi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan adalah: materi dan daftar hadir. Sebagaimana hasil wawancara dengan RS, “Apa ya. Biasanya daftar hadir, paling sama materi”, dan juga NS “Daftar hadir itu pasti. Kadang juga print out materi biar bisa dibaca-baca dirumah”. Dokumentasi digunakan sebagai laporan kepada pimpinan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pedoman pelaksanaan penyuluhan.

Proses Evaluasi implementasi penyuluhan Pancasila melalui catatan akhir yang dibuat oleh penyuluh. Dalam pelaksanaan penyuluhan materi yang sesuai dengan kondisi dan semangat pemateri menjadi faktor pendukung faktor kegiatan penyuluhan. Semakin semangat semakin maksimal hasilnya sebagaimana hasil wawancara dengan RS, “kalau saya nggak grogi, biasanya mengalir lancar. Tapi kalau saya grogi ya hasilnya kurang maksimal, peserta kayak ngantuk gitu Pak.”

Dalam pelaksanaan penyuluhan ada kendala yang dialami sebagaimana hasil wawancara dan analisis dokumen laporan pelaksanaan penyuluhan diantaranya peserta kurang paham materi, lupa dan merasa sulit. Peserta yang tidak paham, lupa dan merasa sulit biasanya diatasi dengan mengulang-ulang apa yang disampaikan hingga para jamaah paham dengan apa yang disampaikan. Evaluasi dicatat dan dijadikan laporan kepada pimpinan sebagaimana hasil dokumen laporan mingguan penyuluh.

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi dilaksanakan secara mandiri oleh penyuluh terhadap kegiatan penyuluhan dan dilaporkan kepada pimpinan secara berkala. Hasil evaluasi bersama pimpinan berupa rekomendasi untuk perbaikan berikutnya.

Proses implementasi penyuluhan Undang Undang Dasar 1945

Proses implementasi penyuluhan Undang Undang Dasar 1945 di masyarakat oleh penyuluh agama Islam non PNS dilaksanakan melalui proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Proses

perencanaan implementasi penyuluhan undang-undang Dasar 1945 dilaksanakan dengan menyusun rencana jadwal pelaksanaan kegiatan penyuluhan sebagaimana pedoman pelaksanaan teknis bagi para penyuluh. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan penyuluh dari Ponorogo RS, “Perencanaan sama dengan Perencanaan Pancasila. Ada rencana kerja tahunan, dan bulanan.” Sejalan dengan pernyataan RS, penyuluh dari Tulungagung, NS menyatakan bahwa “Perencanaan dilakukan lebih banyak, soalnya kan UUD 1945 ini point-pointnya banyak dan harus diringkas agar mudah dipahami dan disampaikan” .

Ketua Pokjalah Ponorogo berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa ada perencanaan tahunan, bulanan dan mingguan yang disetujui oleh penyuluh tingkat kecamatan yang dilaporkan kepada ketua Pokjalah. Begitu juga dengan keterangan dari ketua Pokjalah dari Pamekasan dan Tulungagung.

Dari analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan, pelaksanaan materi implementasi Undang Undang Dasar 1945 dirancang sesuai program kerja mingguan, bulanan, dan tahunan. Perencanaan di atas sebagai program yang disusun untuk kelompok binaan sebagaimana pedoman teknis perencanaan penyuluhan. Hal ini sebagaimana pernyataan Ketua Pokjalah dari Ponorogo, Pamekasan dan Tuungagung bahwa ada proses perencanaan yang harus dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam Non PNS.

Dalam teknis di lapangan, pelaksanaan penyuluhan dilaksanakan secara terjadwal kepada kelompok binaan sehingga kelompok binaan sudah terbiasa dengan agenda tersebut. Dampak dari jadwal yang tersusun rapi ini adalah maksimalnya jumlah kehadiran kelompok binaan. Adapun waktu hari pelaksanaan bermacam-macam, menyesuaikan dengan jadwal yang disepakati. Berdasarkan analisis dokumen menunjukkan pelaksanaan penyuluhan oleh NS dari Tulungagung dilaksanakan setiap hari Ahad, sedangkan RS dari Ponorogo setiap hari sabtu.

Dalam perencanaan bukan hanya menyiapkan kapan dilaksanakan, namun juga menyiapkan materi yang akan disampaikan. Materi yang akan disampaikan dirancang dalam bentuk materi ajar yang bersumber dari buku maupun sumber lain seperti internet. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan penyuluh dari Ponorogo, RS “Biasanya saya susun dulu agar saya bisa paham dan peserta juga tentunya akan lebih paham.” Dan

juga wawancara dengan NS dari Tulungagung “Saya susun *point-point* pentingnya dan saya print untuk peserta, jadi peserta juga bisa baca-baca di rumah.”

Hasil wawancara dengan AR dari Pamekasan “saya ambil dari buku empat pilar, kemudian saya buat garis besarnya sebagai bahan acuan materi.” Hasil wawancara dengan ketua Pokjaluh dari Ponorogo, Pamekasan dan Tulungagung juga menyatakan hal yang sama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyusunan materi yang akan disampaikan menjadi salah satu *point* penting dalam implementasi empat pilar kebangsaan, khususnya materi Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam pelaksanaan penyuluhan, penyuluh menggunakan berbagai macam metode seperti ceramah, tanya jawab dan diskusi sebagaimana hasil wawancara dengan penyuluh NS, RS dan AR. Begitu juga hasil analisis dokumen laporan pelaksanaan penyuluhan yang diperoleh dari ketua Pokjaluh menyebutkan bahwa metode yang digunakan oleh penyuluh adalah ceramah, tanya jawab dan diskusi. Metode ceramah dianggap cocok oleh penyuluh untuk semua kelompok bimbingan. Hal ini karena ceramah merupakan transfer pemahaman dari pendidik kepada peserta didik, dari guru kepada murid, dari penyuluh kepada jamaah.

Adapun dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan adalah: materi dan daftar hadir. Sebagaimana hasil wawancara dengan Penyuluh RS, dan juga NS. Daftar hadir digunakan sebagai laporan kepada pimpinan. Hasil analisis dokumen menunjukkan bahwa daftar hadir dijadikan sebagai salah satu dokumen laporan, hal ini sesuai juga dengan Tupoksi sebagai penyuluh Agama Islam Non PNS.

Hasil observasi dalam pelaksanaan penyuluhan materi yang sesuai dengan kondisi dan semangat pemateri dalam menyampaikan materi bimbingan menjadi faktor pendukung kegiatan penyuluhan. Semakin semangat semakin maksimal hasilnya semakin maksimal. Hal ini sejalan dengan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Penyuluh.

Dalam pelaksanaan penyuluhan ada kendala yang dialami penyuluh di antaranya peserta yang kurang paham materi. Peserta yang tidak paham biasanya diatasi dengan mengulang-ulang apa yang disampaikan hingga para jamaah paham dengan apa yang disampaikan. Hal ini merupakan saran dari Pokjaluh yang disampaikan kepada penyuluh berdasarkan hasil wawancara.

Proses implementasi penyuluhan NKRI

Proses implementasi penyuluhan NKRI di masyarakat yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam non PNS di Jawa Timur dilaksanakan melalui proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Perencanaan dalam kegiatan penyuluhan NKRI kepada kelompok bimbingan dilaksanakan dengan mengacu pada program kerja yang telah dibuat. Dari program kerja yang telah dibuat kemudian dibuat persiapan teknis di antaranya penyediaan materi dan penyediaan tempat serta pengkondisian kelompok binaan sebagaimana hasil wawancara dengan penyuluh RS, “perencanaan kami lakukan dengan membuat perencanaan tahunan, dan bulanan. Untuk NKRI ini memang lebih ditekankan karena memang agak sulit dipahami, meskipun sering dipraktekkan.” Sejalan dengan pendapat RS, NS Penyuluh dari Tulungagung juga menyatakan, “saya melihat rencana kerja yang telah saya buat, kemudian melakukan persiapan penyuluhan yaitu menyiapkan materi dan menghubungi ketua kelas kelompok binaan. Kemudian dilaksanakan penyuluhan.” Penyuluh AR juga menyatakan bahwa, “Awalnya ada program perencanaan tahunan, dan bulanan. Kemudian kami lihat jadwalnya, ketika sudah waktunya baru kami lakukan penyuluhan, dari memaksimalkan peserta, sampai menyiapkan materi demi kesuksesan agenda ini.”

Dari analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan, pelaksanaan materi implementasi NKRI dirancang sesuai program kerja mingguan, bulanan, dan tahunan. Program kerja dirancang bersama ketua Pokjaluh sebagaimana hasil wawancara dengan Ketua Pokjaluh dari Ponorogo, Tulungagung dan Pamekasan.

Nilai-nilai NKRI yang diajarkan oleh penyuluh agama Islam non PNS di Jawa Timur dirancang dalam bentuk materi ajar sebagaimana hasil wawancara dengan penyuluh RS, “Dari bahan yang ada dan dari internet saya buat *point-point* materi inti.” dan juga hasil wawancara dengan peserta penyuluhan yaitu PSP. Begitu juga hasil wawancara dengan NS, penyuluh dari Tulungagung “lebih ke pengembangan, artinya materi yang saya siapkan, saya kembangkan lagi agar peserta mudah memahami dan tentunya kuat dengan muatan keimanan dan persatuan.”

Materi dirancang oleh penyuluh sebagai bahan untuk menyampaikan kepada kelompok binaan agar mudah dipahami. Tahap perencanaan materi

diambil dari berbagai sumber di antaranya internet, buku pedoman dan buku empat pilar kebangsaan.

Pelaksanaan penyuluhan dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan. Kelompok binaan dikoordinir untuk berkumpul oleh ketua. Ketua kelompok binaan berkoordinasi dengan penyuluh untuk waktu dan tempat pelaksanaan penyuluhan, termasuk segala perlengkapan yang dibutuhkan dikoordinasikan antara penyuluh dengan ketua.

Dalam melaksanakan penyuluhan, penyuluh menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi. Hal ini sebagaimana penjelasan hasil wawancara dengan penyuluh Ponorogo RS, “metode ceramah dan tanya jawab.” Sedangkan NS menggunakan ceramah dan tanya jawab, “yang umum saja Pak, ceramah dan tanya jawab, kalau yang aneh-aneh kasihan pesertanya, sudah berumur.”

Dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan adalah: materi dan daftar hadir. Keduanya digunakan juga sebagai laporan kepada pimpinan. Daftar hadir diisi oleh masing-masing peserta berupa tanda tangan. Sedangkan peserta yang izin diberi tanda tersendiri. Daftar hadir juga memuat tanggal dan waktu pelaksanaan.

Dalam pelaksanaan penyuluhan materi yang sesuai dengan kondisi dan semangat pemateri menjadi faktor pendukung faktor kegiatan penyuluhan. Semakin semangat semakin maksimal hasilnya sebagaimana hasil wawancara dengan RS, “Kalau kita semangat, dan hasilnya maksimal”.

Dalam pelaksanaan penyuluhan ada kendala yang dialami penyuluh di antaranya peserta yang kurang paham materi, lupa dan merasa sulit sebagaimana hasil wawancara dengan penyuluh NS, peserta penyuluhan PSP dan juga analisis dokumen hasil evaluasi Pelaksanaan penyuluhan materi Undang-undang Dasar 1945. Peserta yang tidak paham, lupa dan merasa sulit biasanya diatasi dengan mengulang-ulang apa yang disampaikan hingga para jamaah paham dengan apa yang disampaikan. Sebagaimana hasil wawancara dengan RS “pakai undangan agar lebih semangat datang dan pakai speaker masjid agar peserta tidak lupa. Sedangkan untuk materi ya sebaiknya penyuluh pelan dan santai dalam menyampaikan serta yang penting dan mengena menurut saya butuh iustrasi-ustrasi agar mudah diingat.”. Sedangkan NS menjelaskan bahwa “lebih tegas kepada peserta dan cerdas mencari solusi media pembelajaran.”

Proses implementasi penyuluhan Bhineka Tunggal Ika

Proses implementasi penyuluhan Bhineka Tunggal Ika di masyarakat yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam non PNS di Jawa Timur dilaksanakan melalui proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Perencanaan implementasi penyuluhan Bhineka Tunggal Ika direncanakan melalui rencana program kerja yang telah dibuat. Dari rencana program kerja kemudian dilaksanakan persiapan teknis. Perencanaan program kerja meliputi program bulanan, dan tahunan sebagaimana hasil wawancara berikut dengan penyuluh RS, “pertama lihat kalender rencana kerja baik tahunan, bulanan, setelah itu menyusun agenda kegiatan dan menyiapkan hal-hal teknis.” Begitu juga dengan hasil wawancara dengan penyuluh NS, “perencanaan kami lakukan dengan menyusun rencana kerja tahunan, dan bulanan. Dari situ kita tahu apa yang harus kita kerjakan, termasuk agenda penyuluhan materi bhineka tunggal ika.” Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Pokjalah Ponorogo, Pamekasan dan Tulungagung yang menyatakan bahwa ada koordinasi dalam penyusunan program kerja yang dibuat oleh Penyuluh.

Dari analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan dirancang sesuai program kerja mingguan, bulanan, dan tahunan. Perencanaan teknis yang dilakukan di antaranya persiapan materi, tempat dan peserta.

Materi penyuluhan Bhineka Tunggal Ika yang diajarkan oleh penyuluh agama Islam di Jawa Timur dirancang dalam bentuk materi ajar sebagaimana hasil wawancara dengan RS, “saya susun dalam bentuk materi sederhana yang mudah dipahami.” Begitu juga dengan NS, “Saya susun dari berbagai sumber agar lengkap dalam bentuk materi.”

Penyuluhan dilakukan kepada kelompok binaan dengan ceramah, diskusi dan tanya jawab. Hal ini sebagaimana penjelasan hasil wawancara dengan RS, “metode yang saya gunakan ceramah.” dan juga wawancara dengan NS, “metodenya ceramah dan tanya jawab.” AR juga menyatakan hal yang sama, “metode yang saya gunakan ceramah dan tanya jawab.” Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan peserta penyuluhan bahwa pertemuan dilaksanakan dalam kegiatan pengajian mingguan, yang secara otomatis menggunakan ceramah umum.

Adapun dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini diantaranya yaitu materi

dan daftar hadir. Sebagaimana hasil wawancara dengan AR, “perangkat dokumentasinya ada daftar hadir”, dan juga NS “perangkat dokumentasinya ada daftar hadir.” Hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara bahwa peserta yang hadir biasanya mengisi daftar hadir.

Dalam pelaksanaan penyuluhan materi yang sesuai dengan kondisi dan semangat pemateri menjadi faktor pendukung faktor kegiatan penyuluhan. Semakin semangat semakin maksimal hasilnya sebagaimana hasil wawancara dengan NS, “sarana prasarana dan suasana, kalau suasananya menyenangkan biasanya masuk apa yang disampaikan.”

Dalam pelaksanaan penyuluhan ada kendala yang dialami penyuluh di antaranya peserta yang kurang paham materi. Peserta yang tidak paham biasanya diatasi dengan mengulang-ulang apa yang disampaikan hingga para jamaah paham dengan apa yang disampaikan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan peserta penyuluhan bahwa dengan diulang-ulang, materi dapat diserap lebih baik.

Pembahasan

Implementasi penyuluhan empat pilar kebangsaan di masyarakat salah satunya merupakan tugas dari penyuluh agama Islam non PNS, namun demikian untuk mengamalkan empat pilar dibutuhkan kesadaran seluruh warga negara sebagaimana hasil penelitian terdahulu oleh Damanhuri, dkk (2016: 185-198) menyatakan bahwa dalam implementasi Pancasila sangat dibutuhkan peran serta seluruh pihak yang berwenang, bukan hanya warga masyarakat. Melalui penyuluh agama Islam non PNS, setidaknya telah tersampaikan kepada sebagian kelompok masyarakat yang tergabung dalam kelompok bimbingan, hal ini tentu sangat membantu dalam mewujudkan ideologi bangsa Indonesia, karena sebuah ideologi perlu disampaikan agar menjadi keyakinan dan *way of life*, sebagaimana pendapat Elyah (2017:6) bahwa sebuah ideologi perlu untuk terus eksis dengan berbagai jalan. Menurut Elyah (2017:6) berpendapat bahwa Setidaknya ada dua alasan yaitu pertama adalah jumlah penganut atau pengikut. Semakin banyak pengikut dari suatu ideologi, maka ideologi tersebut akan semakin kuat. Pancasila merupakan ideologi yang diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia. Secara konseptual, Pancasila adalah ideologi yang kokoh. Pancasila tidak akan musnah sepanjang

masih ada pengikut yang memperjuangkannya. Kedua adalah seberapa besar pengikut tersebut mempercayai dan menjadikan ideologi sebagai bagian dari kehidupannya. Semakin kuat kepercayaan seseorang, maka semakin kuat posisi ideologi tersebut. Sebaliknya, walaupun banyak pengikut, tetapi apabila pengikut tersebut sudah tidak menjadikan ideologi sebagai bagian dari kehidupannya, maka ideologi dikatakan lemah.

Dalam implementasi empat pilar kebangsaan di Jawa Timur, secara teknis telah sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan penyuluhan yang termaktup dalam pedoman penyuluh agama Islam non PNS sesuai keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 298 tahun 2017. Dalam pedoman tersebut disebutkan bahwa dalam implementasi penyuluhan mencakup proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Dalam tahap perencanaan, penyuluh telah melaksanakan standar perencanaan yaitu melakukan 1) analisis kebutuhan, 2) pemetaan skala prioritas, 3) koordinasi dengan kelompok bimbingan sesuai pedoman. Begitu juga dalam tahap pelaksanaan, penyuluh telah melaksanakan prosedur pelaksanaan dengan memilih metode yang tepat sesuai pedoman. Sedangkan untuk evaluasi dilaksanakan secara individu dan berjenjang kepada atasan, hal ini sesuai dengan pedoman pelaksanaan penyuluhan.

Temuan lain menunjukkan bahwa materi yang digunakan dalam implementasi materi empat pilar kebangsaan menggunakan buku ajar dan materi yang disusun oleh penyuluh sendiri. Menurut Mulyasa (2006 : 96) materi adalah acuan pencapaian yang disusun guru untuk disampaikan kepada murid. Semakin banyak yang ingin dicapai, semakin banyak pula yang akan didapat oleh murid/jamaah. Hal ini sesuai dengan pendapat Hamdani (2011:219) bahwa bahan ajar atau materi ajar merupakan informasi, alat dan/atau teks yang diperlukan oleh guru untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Bahan ajar yang dibuat oleh penyuluh agama Islam non PNS menggunakan bahan ajar berbentuk cetak hal ini sejalan dengan pendapat Majid (2008 : 174) bahwa ada empat jenis bahan ajar yaitu 1) Bahan cetak (*printed*), 2) Bahan ajar dengar (*audio*), 3) Bahan ajar pandang dengar (*audio visual*), dan 4) Bahan ajar interaktif (*interactive teaching material*). Bentuk materi ajar atau bahan ajar dapat berupa cetak seperti print out materi (*Hand out*). Bahan ajar cetak difungsikan bukan hanya sebagai bahan ajar, namun juga sebagai sarana review materi

bagi jamaah. Penyuluh agama Islam non PNS di Jawa Timur menggunakan hand out, hal ini sesuai dengan pendapat Majid (2007:12) bahwa *hand out* merupakan salah satu bentuk materi ajar cetak. Adapun bentuk materi ajar lain berupa cetak menurut Majid di antaranya yaitu buku, modul, lembar kegiatan peserta didik, foto/gambar, dan bagan.

Materi ajar disusun sedemikian rupa sehingga dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan penyuluhan. Materi ajar yang digunakan disusun dari berbagai sumber agar lebih padat dan mudah dipahami. Dalam melaksanakan penyuluhan, penyuluh menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi. Metode tersebut dipilih karena jamaah penyuluhan rata-rata sudah berusia lanjut. Metode diatas dianggap cocok oleh penyuluh. Hal ini sesuai dengan teori pembelajaran andragogi atau teori pembelajaran untuk orang dewasa sebagaimana pendapat Dugan Laird (dalam Hendayat, 2005 : 135) mengatakan bahwa andragogi mempelajari bagaimana orang dewasa belajar.

Implementasi nilai-nilai Pancasila sila pertama menurut Ketut Ridjin (2012: 192) yaitu sembahyang, berdoa, membaca buku suci, berguru pada tokoh agama, serta mempunyai toleransi agama/ kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan pendapat Rukiyati (2010: 58) makna Tuhan Yang Maha Esa, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses implementasi penyuluhan Pancasila dilaksanakan sesuai petunjuk teknis yaitu berupa perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Implementasi Pancasila lebih mudah dilaksanakan karena objek bimbingan sudah terbiasa mendengar istilah Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Proses implementasi penyuluhan Undang Undang Dasar 45 dilaksanakan sesuai petunjuk teknis yaitu berupa perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Implementasi Undang Undang Dasar 45 lebih sulit dilaksanakan karena objek bimbingan merasa berat dengan bahasan pasal-pasal yang multi tafsir. Proses implementasi penyuluhan NKRI dilaksanakan sesuai petunjuk teknis yaitu berupa perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Proses implementasi penyuluhan Bhineka Tunggal Ika dilaksanakan sesuai petunjuk

teknis yaitu berupa perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Kendala dalam implementasi penyuluhan empat pilar kebangsaan diantaranya pemahaman jamaah yang berbeda, usia yang bervariasi, dan terbatasnya media pembelajaran. Adapun solusinya adalah penyuluh berkoordinasi dengan ketua kelompok binaan dan ketua pokjalu dengan hasil diantaranya dengan pengulangan materi, diskusi kelompok sesuai usia, metode yang sesuai dengan karakteristik jamaah dan berusaha menyiapkan media-media baru yang sesuai.

Saran

Saran untuk lembaga diklat Kementerian Agama provinsi Jawa Timur yaitu hendaknya penyuluh Agama Islam non PNS di Jawa Timur diberikan diklat lanjutan mengenai pendalaman konten materi lebih tinggi dari diklat sebelumnya (diklat brjenjang) terutama kemampuan dalam melakukan inovasi penyuluhan. Termasuk penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan, seperti media penyuluhan, LCD, dll Kemenag provinsi juga perlu mengadakan standarisasi penyuluh agar penyuluh lebih dipercaya masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : Renika Cipta.
- Cristine dan Kansil, 2011, *Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta, Rineka Cipta
- Damanhuri, dkk. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa UCEJ, Vol. 1, No. 2, Desember 2016, h. 185-198 ISSN : 2541-6693
- Hamdani. 2011. *Strategi Belajar Mengajar*. Bandung: Pustaka Setia
- Hendayat. S. 2005. *Pendidikan dan Pembelajaran (teori, permasalahan dan praktik)*. Malang :Universitas Muhammadiyah Malang
- Kaelan. 2012. *Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*. Paradigma. Yogyakarta.
- Kartadinata, Soenaryo. 2011. *Pidato Rektor Pada Upacara Wisuda Gelombang III Universitas Pendidikan Indonesia, 21-22 Desember*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

- Karim, M. Abdul. 2004. *Menggali Muatan Pancasila dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Surya Raya
- Keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ. III/342/ Tahun 2016 tentang *Petunjuk Teknis Pengangkatan Penyuluh Agama Islam Non PNS*
- Keputusan Dirjen Bimas Islam nomer 298 tahun 2017 tentang *Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS*
- Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 164 Tahun 1996 tentang *Honorarium Penyuluh Agama*
- Kusuma R.M. A.B., 2004. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tatanegara Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- KMA Nomor 164 tahun 2016 tentang Penetapan Honorarium bagi Penyuluh Agama non PNS
- Lexy, Mleong, 2000. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. Ke 11.
- M.Aqil Irham, *Pengamanan Pilar Bangsa Dan Masa Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia* file:///C:/Users/user/Downloads/398-494-1-SM.pdf diakses 1 Desember 2018
- Majid, Abdul. 2011. *Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya DEPDIKNAS
- Masdar Farid Mas'udi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta : Alfabeta, 2010), h. 50-51.
- Mayor Laut Elyah Musarovah, (*Pamen Mako Akademi TNI*) *Pemantapan Nilai-Nilai Pancasila Kepada Generasi Muda Sebagai Jati Diri Bangsa Yang Sejati* <https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2017/11/wirawebgabung.pdf> diakses 1 Desember 2018
- Mulyasa E. 2006. *Kurikulum yang Disempurnakan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurgiyantoro, B. dan Thobroni, M. 2010. "Multikulturalisme dalam Cerita Tradisional Yogyakarta". *Jurnal Penelitian Humaniora*. (Online), Jilid II Nomor 2 Halaman 154-169, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/662/5.%20muhammadiyah%20thobroni.pdf?sequence=1> diakses 1 Desember 2018
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 04 tahun 2012 tentang *Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis di Lingkungan Kementerian Agama*
- Sekretariat Jendral, 2012. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI.
- Soeprapto, 2010. *Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: LPPKB.
- Soetomo, 2011, *Masalah Sosial*, Pustaka Pelajar: Jakarta
- Sugiyono, 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan dengan pendekatan Kuantitati, Kualitatif dan R dan D*, Bandung: CV Alfabeta.
- _____, 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sutopo, HB. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press.
- Winarno, 2007. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/04/06/o57gup284-40-persen-mahasiswa-tidak-hafal-pancasila> diakses 15 mei 2018 pukul 06.00 wib
- <https://jatim.bps.go.id/statictable/2018/01/30/755/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-tahun-2012-2017.html> diakses 14 Januari 2019 pukul 06.00 wib